



Pengaruh Penerapan *Good Governance* Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Leontina Julia Renyut

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Indonesia

Korespondensi: leontinjr@gmail.com



Copyright: © 2024 by the authors.

Submitted for possible open access

publication under the terms and conditions of the Creative

Commons Attribution (CC BY) license

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

How to Cite :

Renyut, L. J. (2024). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Sistem

Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

. *Papsel Economic Journal*, 2(1).

<https://doi.org/10.63185/pej.v2i1.132>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data yaitu metode kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS 20. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Merauke yang berjumlah 30 SKPD, dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 28 SKPD dan diperoleh 97 data. Metode analisis regresi *linear* berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Good Governance (X1) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y), Sistem Pengendalian Intern (X2) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).

Kata kunci : Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas Keuangan Daerah

Abstract: This study aims to determine how implementing good governance and internal control systems affects regional financial accountability in Merauke district. In this study, using a quantitative approach, the type of data used is primary data with a data collection method, namely the questionnaire method. At the same time, the data analysis used is descriptive, classic assumption test, and hypothesis testing with the help of SPSS. The population in this study were all SKPD in Merauke Regency, totaling 30 SKPD. Using a purposive sampling method based on predetermined criteria, 28 SKPD were obtained and 97 data were obtained using -multiple linear regression analysis method. The study results show that implementation good governance effects regional financial accountability, and the internal control system effects provincial financial responsibility.

Keywords: Implementation of Good Governance, Internal Control System, Regional Financial Accountability

DOI : <https://doi.org/10.63185/pej.v2i1.132>

1. PENDAHULUAN

Masa reformasi membawa dampak terhadap akuntabilitas publik dan keterbukaan dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik diartikan sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan sistem pengendalian intern. Akuntabilitas menurut Erlina (2013) adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang sudah ditetapkan secara periodik dan penerapan kebijakan yang telah dipercayakan terhadap entitas pelaporan.

Dimensi akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Berdasarkan tugas akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah berhak mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Indriasari, 2008).

Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangannya mulai dari perencanaan anggaran, pemakaian anggaran serta pelaporan anggaran secara penuh. Akuntabilitas terkait laporan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan, dalam hal ini laporan yang mengandung informasi relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna, melainkan juga laporan secara langsung tersedia dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut.

Selain melalui penyajian laporan keuangan, akuntabilitas yang efektif juga tergantung pada kemudahan dari seseorang dalam memperoleh informasi terkait dalam laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah berhak untuk memperoleh informasi keuangan sebagai bentuk akuntabilitas (Aliyah, 2012). Kita ketahui bersama bahwa memang akuntabilitas pemerintahan menjadi salah satu fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini menghancurkan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Menurut Sadjarto (2000) Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

- a. Akuntabilitas Keuangan.
- b. Akuntabilitas Manfaat
- c. Akuntabilitas Prosedural

2.2. *Good Governance*

Perkembangan teknologi adalah sebuah acuan dasar mewujudkan suatu pengelolaan daerah, sehingga pemerintah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *Good Governance*. *Good Governance* merupakan sebuah upaya dalam tata pemerintah yang baik, untuk menciptakan sebuah *Good Governance* pemerintah perlu melakukan sebuah sentralisasi yang sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas korupsi, dan nepotisme. (Rahmatika, 2014). Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan demi memenuhi seluruh aspirasi dari masyarakat dan demi mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan diterapkan UU No. 28 Tahun 1999 dan Tap. MPR RI No. XI/MPR/1998 yang di dalamnya menjelaskan tentang penyelenggara negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak tahun 2003 telah dikeluarkan paket Undang-Undang (UU) pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari suatu perubahan mendasar dibanding pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Definisi *Good Governance* berdasarkan *Word Bank* ialah sebagai suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang solid dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik yang dilakukan secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran, serta menciptakan perbuatan hukum dan kerangka politik guna tumbuhnya usaha. (Mardiasmo, 2009).

2.3. Sistem Pengendalian *Intern*

Mahmudi (2016) berpendapat bahwa Sistem Pengendalian *Intern* adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu golongan diantaranya efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Tunggal, 2013).

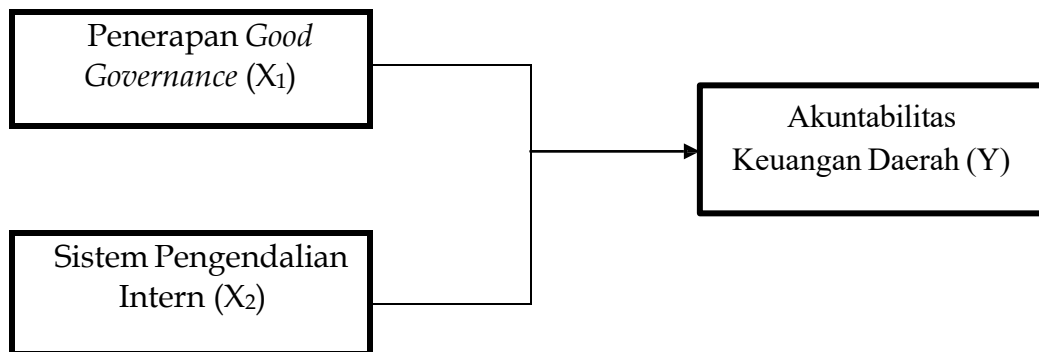
Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur pengendalian intern pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah No 60 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- b. Penaksiran Resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan sehingga kita dapat melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam akuntabilitas kinerja.
- d. Informasi dan Komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan bertanggungjawab atas kinerja mereka.
- e. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas akuntabilitas kinerja sepanjang waktu

Kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir Pengembangan Hipotesis

H1: Penerapan *Good Governance* (X_1) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

H2: Sistem Pengendalian *Intern*(X_2) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

3. METODOLOGI

Lokasi penelitian dilakukan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke, Waktu penelitian dimulai dari Juli 2022 sampai dengan September 2022. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan nilai-nilai dan analisis statistik . Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas dan Badan yang ada Di Kabupaten Merauke yang berjumlah 28 SKPD. Menurut Sugiyono (2018) mendefinisikan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel yang digunakan berjumlah 97.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas ini dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient of Correlation*. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jumlah sampel (n) pada penelitian ini sebanyak 97. Untuk selanjutnya, besarnya df dapat dihitung $97-2 = 95$ dan signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi pada r_{tabel} , maka r_{tabel} didapat sebesar 0,1996. Selanjutnya, membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Jika nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} , maka item pertanyaan dikatakan valid. Menunjukkan hasil uji validitas bahwa seluruh item pertanyaan memenuhi syarat r_{hitung} lebih dari 0,1996. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya pada tabel 1 :

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
Penerapan Good Governance (X1)	X1_1	0,874	0,1996	Valid
	X1_2	0,862	0,1996	Valid
	X1_3	0,884	0,1996	Valid
	X1_4	0,634	0,1996	Valid
	X1_5	0,914	0,1996	Valid
	X1_6	0,887	0,1996	Valid
	X1_7	0,913	0,1996	Valid
	X1_8	0,924	0,1996	Valid
	X1_9	0,921	0,1996	Valid
	X1_10	0,929	0,1996	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X2)	X2_1	0,687	0,1996	Valid
	X2_2	0,804	0,1996	Valid
	X2_3	0,808	0,1996	Valid
	X2_4	0,787	0,1996	Valid
	X2_5	0,756	0,1996	Valid
	X2_6	0,794	0,1996	Valid
	X2_7	0,814	0,1996	Valid
	X2_8	0,775	0,1996	Valid
	X2_9	0,751	0,1996	Valid

	X2_10	0,766	0,1996	Valid
	X2_11	0,732	0,1996	Valid
	X2_12	0,754	0,1996	Valid
	X2_13	0,716	0,1996	Valid
	X2_14	0,671	0,1996	Valid
	X2_15	0,753	0,1996	Valid
	X2_16	0,717	0,1996	Valid
	X2_17	0,724	0,1996	Valid
	X2_18	0,516	0,1996	Valid
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	Y_1	0,713	0,1996	Valid
	Y_2	0,736	0,1996	Valid
	Y_3	0,808	0,1996	Valid
	Y_4	0,774	0,1996	Valid
	Y_5	0,761	0,1996	Valid
	Y_6	0,728	0,1996	Valid
	Y_7	0,706	0,1996	Valid
	Y_8	0,786	0,1996	Valid
	Y_9	0,805	0,1996	Valid
	Y_10	0,653	0,1996	Valid
	Y_11	0,837	0,1996	Valid
	Y_12	0,751	0,1996	Valid

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner pada variabel Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian *Intern* dan Akuntabilitas Keuangan Daerah menunjukkan r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (0,1996) sehingga dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan dan pertanyaan variabel dinyatakan valid dan data yang di kumpulkan dapat memberikan hasil yang baik.

Pengukuran reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai $\alpha > 0,70$ (Ghozali (2016). Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,965	0,70	Reliable
Sistem Pengendalian <i>Intern</i>	0,952	0,70	Reliable
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0,930	0,70	Reliable

Nilai *cronbach's alpha* pada tabel 2 diatas semua variabel lebih dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel Penerapan *Good Governance*, Sistem Pengendalian *Intern* dan Akuntabilitas

Kuangan Daerah semua dinyatakan handal arau dipercaya sebagai alat ukur variabel dalam penelitian yang dilakukan di SKPD Kabupaten Merauke.

Pengujian normalitaas menggunakan metode yaitu dengan uji statistik. Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah pengujian *one sampel Kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *one sampel Kolmogorov-smirnov* lebih besar dari 0,05. Berikut disajikan tabel hasil uji statistik:

Tabel 3 Hasil uji Normalitas - One-Sample *Kolmogorov-Smirnov*

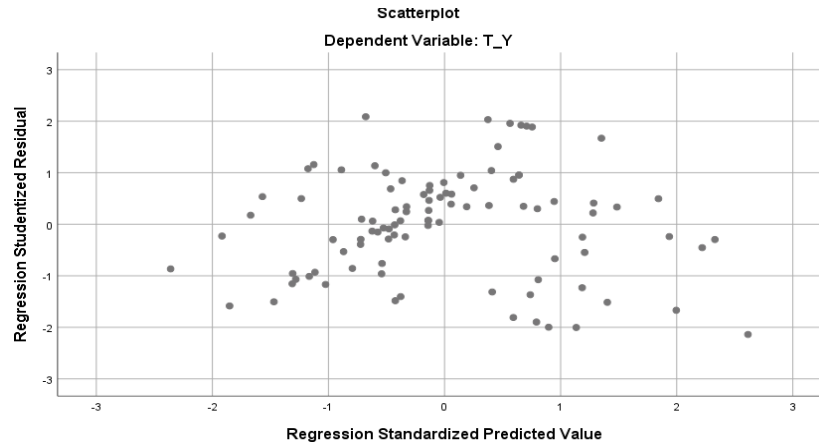
		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	9,86032033
Most Extreme Differences	Absolute	0,061
	Positive	0,044
	Negative	-0,061
Test Statistic		0,061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa uji normalitas menggunakan teknik analisis *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Penerapan <i>Good Governance</i> (X1)	0,964	1,037	Tidak terjadi Multikolinearitas
Sistem Pengendalian <i>Intern</i> (X2)	0,964	1,037	Tidak terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen, hal ini ditunjukkan oleh nilai VIF untuk semua variabel adalah 1,037 yang artinya lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel adalah 0,964 yang artinya lebih dari 0,10.



Gambar 2 Hasil uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* terlihat antara SRESID dan ZPRED memperlihatkan pola titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi akuntabilitas keuangan daerah berdasarkan penerapan *good governance* dan sistem pengendalian *intern*.

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.426 ^a	0,182	0,164	9,965

Pada tabel didapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,182 atau 18,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh variabel Penerapan *Good Governance* dan sistem pengendalian intern sebesar 18,2%. Sedangkan 81,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 6 Uji Parsial (t)

Model		Tolerance	Signifikan
1	(Constant)	3.378	.001
	Penerapan <i>good governance</i> (X1)	2.353	.021
	sistem pengendalian <i>intern</i> (X2)	4.291	.000

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Penerapan *Good Governance* (X1) terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh hasil signifikan dan pengaruh penerapan *good governance* (X1) terhadap Akuntabilitas Keuangan (Y) adalah 0,021, dimana signifikan t lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ pada $df = n-k$

$(97-3) = 94$ maka dinyatakan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.353 > 1,985$). Hal tersebut berarti bahwa hipotesis 1 (satu) diterima yang artinya bahwa Penerapan *Good Governance* (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).

- b. Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* (X2) terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Berdasarkan hasil tabel 4.15 diperoleh hasil signifikan pengaruh sistem pengendalian *intern* (X2) terhadap Akuntabilitas Keuangan (Y) adalah 0,00 dimana signifikan t lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ pada $df = n-k$ ($97-3) = 94$ maka dinyatakan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.291 > 1,985$). Hal tersebut berarti bahwa hipotesis 2 (dua) diterima yang artinya bahwa Sistem Pengendalian *Intern* (X2) secara parsial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y).

Penerapan *Good Governance* Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Merauke

Berdasarkan data kuesioner yang telah diolah oleh peneliti pada variabel *good governance* yang paling dominan dengan rata nilai tertinggi terdapat pada indikator 1 pernyataan nomor 1 yaitu saya sebagai pegawai selalu menjalankan tugas, dan wewenang sesuai dengan jabatan yang anda pegang dengan nilai rata-rata 3,95 dan pada variabel akuntabilitas keuangan daerah yang paling dominan dengan rata-rata nilai tertinggi terdapat pada indikator 1 pada pertanyaan nomor 1 yaitu laporan keuangan instansi atau lembaga tempat saya bekerja disusun atau disajikan sebagai tolak ukur kebutuhan para pengguna laporan keuangan dengan nilai rata-rata 4,04. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dapat dikatakan baik dalam pengembangan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan laporan keuangan yang mulai dari penganggarannya, penggunaannya sampai dengan pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap dana yang berasal dari masyarakat luas.

Hasil analisis data untuk hipotesis dengan uji t memperoleh nilai signifikansi pengaruh variabel Penerapan *Good Governance* (X1) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar $0,021 < 0,05$ dimana dibuktikan dengan melihat nilai t_{hitung} $2.353 > t_{tabel}$ 1,985. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 1 (satu) diterima bahwa Penerapan *Good Governance* (X1) secara Parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD khususnya bagian keuangan di Kabupaten Merauke.

Penggunaan Sistem Pengendalian *Intern* Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan data kuesioner yang telah diolah oleh peneliti pada variabel sistem pengendalian *intern* yang paling dominan dengan rata nilai tertinggi terdapat pada indikator 5 pada pertanyaan nomor 18 yaitu pimpinan instansi atau lembaga selalu mereview dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan

perlu perbaikan dengan nilai rata-rata 3,29 dan pada variabel akuntabilitas keuangan daerah yang paling dominan dengan rata-rata nilai tertinggi terdapat pada indikator 1 pada pertanyaan nomor 1 yaitu laporan keuangan instansi atau lembaga tempat saya bekerja disusun atau disajikan sebagai tolak ukur kebutuhan para pengguna laporan keuangan dengan nilai rata-rata 4,04. Berdasarkan jawaban dari responden dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian *intern* yang dimaksudkan disini adalah bagaimana cara suatu instansi melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program. Jadi sistem pengendalian *intern* ini dijadikan sebagai suatu badan pengawasan terhadap berjalannya suatu program dalam instansi pemerintah. Sistem pengendalian *intern* ini sangat penting dalam suatu instansi untuk mengawasi dan melaksanakan evaluasi untuk program-program yang berjalan sehingga program dapat terealisasi dengan baik. Secara teoritis, sistem pengendalian intern atau yang disingkat dengan SPI menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan perundang-undangan. Hasil analisis data pada hipotesis dengan uji t memperoleh nilai signifikansi pengaruh variabel Sistem pengendalian *intern* (X2) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) sebesar $0,00 < 0,05$ dengan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4.291 > 1,985$ sehingga hipotesis (H_0) ditolak dan (H_{a2}) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Penerapan *good governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Merauke. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan *good governance* yang baik akan mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah dimana tujuan penerapan *good governance* sangatlah penting dalam proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Sistem pengendalian *intern* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Merauke. Hal ini dikarenakan bahwa sistem pengendalian intern akan berpengaruh meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah yang dihasilkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., & Rahmatika, D. N. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian Pada Pemerintah Daerah Indonesia). *Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (hlm. 111-121).
- Aliyah, Siti dan Aida Nahar, (2012). “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi

- dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Kabupaten Jepara”.
- Amijaya. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening. Vol. 13, No.2, Desember 2019, 70-80.
- Azlim, Darwanis & Usman Abu Bakar, 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh , Jurnal Akuntansi, Volume 1, Nomor 1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2020. Ikhtisar. Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 10 Juli 2022). Jakarta
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2022). Jakarta
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2019. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2022). Jakarta
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020. (www.bpk.go.id, diakses pada tanggal 15 Juli 2022). Jakarta
- Darmanto, F.K., Nursiam, D., & Nursiam, M. H. (2017). Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangayer (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Erlina, Rasdianto, (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruwal, Medan: Brama Ardian.
- Friyani, Rita. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Sains Sosiohumaniora, 1(2), 142-147
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII. Semarang. : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harmawati. (2016). “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Study Empiris SKPD Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi Universitas Islam Alauddin Makassar.
- Hasibuan Nurul Hidayah. (2018). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Study Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi”. Skripsi
- Halim, Abdul. (2006) Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

<http://djpb.kemenkeu.go.id>,2021 <http://portal.merauke.go.id>,2021

- Indriasari, Desi Dan Ertambang Nahartyo. (2008). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, Dan Pengendalian Intern, Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: Studi Pada Pemerintahan Kota Palembang Dan Kabupaten Organ Ilir). Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli.Pontianak.
- Jubaedah. (2007). " Pengembangan Good Corporate Governance Dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 5, No.1 Tahun 2007. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau.
- Klasi, N. S. dan Rafi Kiran. (2015). A Strategic Framework For Good Governance Through E- Governance Optimization - A Case Study Punjab In India. *Emerald*. Vol.49, no. 2, 2015, PP 170-204
- Karlina Arsiliya, (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah ". Tesis. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- KNKG. 2008. Pedoman Good Public Governance. KNKG Indonesia.
- KPK. 2008. Kependudukan dan Kelembagaan DPRD dalam Konteks Good Governance. Jakarta.
- Kurniawan Agung. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- LAN,BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. LAN. (2013). Lembaga administrasi negara 2013.
- Lestiyawan, Handi Y. Dan Bambang Jatmiko. 2015. Key Succes Faktor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul). *Maksimum* Vol. 5 No 1 September 2015 - Februari 2016.
- Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jogjakarta: UPPSTIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nurhakim, M. R. (2014). Implementasi e-Government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sistem pengendalian Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. XI No.3, 403- 422.
- Organisasi for Economic Cooperation and Development. (2004). OECD. Principles of Corporate Governance. 2004. The OECD Paris.
- Rahmadani, S. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman barat, 2(2), 1-15.
- Rinaldi, R.R. (2016). Pengaruh Penerapan Good Governance, Audit Kerja dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Keuangan, 2(2), 138-150.
- Santoso, E. B. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten lampung Timur). *Jurnal Ekonomi*.
- Schiavo,-Compo,S dan Tomasi, D. (1999). *Managing Government Expenditure*. Asia Development Bank. Manila..
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Cetakan Kesembilanbelas. Bandung.
- Sudiarianti, Ni Made, Dkk. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Mendan.
- Sundari, D.,& Mulyadi, J. (2018). *Kompetensi Pengelolaan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia*. *Jurnal Riset akuntansi dan Perpajakan Jrap*.
- Suratmi, N. M. (2014). Pengaruh Widyarningsih, Aristanti. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan. Vol.10 No.2 Desember 2015.
- Zyen, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*, Volume 1 No 1. Hal 21-37. Universitas Pasundan, Bandung.
- Suryaningrum Risma. (2021). Pengaruh Good Governance, Audit Kerja Standart Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. (Studi Empiris di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Tunggal Amin Widjaja. (2013), *Pengendalian Internal; Mencegah dan Mendekteksi Kecurangan*, Harvarindo, Jakarta.
- Tungga, Wikrama Ananta, Kamong Andi Kurniawan Saputra, Diota Prameswari Vijaya. 2014. "Metode Penelitian Bisnis". Graha Ilmu, Yogyakarta.